



PEMKAB
MAJALENGKA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2023



**BADAN
PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
MAJALENGKA**

KATA PENGANTAR

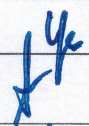
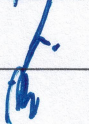

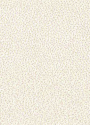
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt., sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka dapat terlaksana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi serta sebagai media informasi publik atas capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja selama Tahun 2023.

Kolaborasi menjadi kunci utama dalam mencapai berbagai sasaran yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Konsep kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak membuat langkah kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih ringan. Kami terus melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin agar selalu memberikan kemudahan dalam mengakses layanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

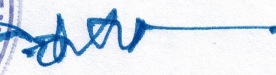
Melalui laporan kinerja ini, izinkan kami untuk menyampaikan perjalanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka dalam mengiringi proses menuju Majalengka Raharja. Kami berharap agar laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun selanjutnya. Kami terus beradaptasi dan berinovasi demi menghasilkan yang terbaik untuk masyarakat Majalengka.

Diketahui oleh:

Sekretaris Badan	
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistisk	
Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi	

Majalengka, 27 Februari 2024

**Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Majalengka**
Kepala Pelaksana



H. ISKANDAR HADI PRIYANTO, S.Sos.,M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19640330 198503 1 007



KATA PENGANTAR



DAFTAR ISI



BAB I PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM
DATA KEPEGAWAIAN
ISU STRATEGIS
SISTEMATIKA PELAPORAN



BAB II PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS
PERKIN 2023
RENCANA ANGGARAN 2023



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

PENGUKURAN KINERJA 2023
ANALISIS CAPAIAN KINERJA
AKUNTABILITAS KEUANGAN



BAB IV PENUTUP



LAMPIRAN

Daftar Isi





BAB I

PENDAHULUAN

Gambaran Umum

Data Kepegawaian

Isu Strategis

Sistematika Pelaporan

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, pelaporan kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada stakeholder. Laporan kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka setiap tahun harus menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023, Rencana Kerja serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

1.1 Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan sub urusan bencana, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Mempunyai tugas pokok, yaitu:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangundangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

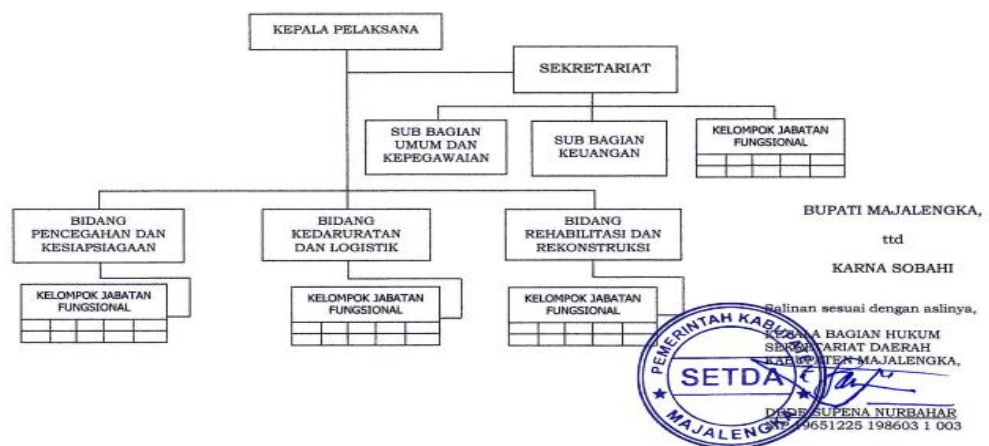
Selain itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terpadu dan menyeluruh;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas.

Berikut Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka:

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
 NOMOR : 71 TAHUN 2021
 TANGGAL : 30 Desember 2021
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA



INFOGRAFIK ASN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



Eselon

I	II	III	IV	
				PNS
-	2	11	5	
				PPPK
-	-	-	-	

II B	1
III A	-
III B	4
IV A	2
IV B	-
JAFUNG	4
FUNGSIONAL UMUM	7

Golongan

Jenis Jabatan

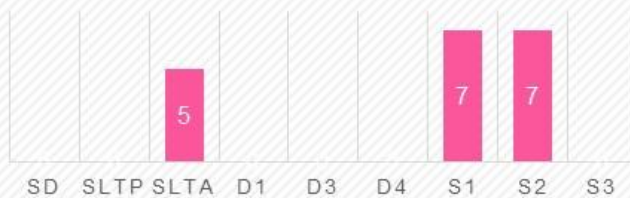
STRUKTURAL



PELAKSANA



FUNGSIONAL



Pendidikan

1.3 Isu Strategis (*Strategic Issued*)

Meperhatikan isu-isu strategis Pemerintah Kabupaten Majalengka, terkait dengan dinamika perkembangan masalah Penanggulangan Bencana di Kabupaten Majalengka baik Kualitas maupun Kuantitas, maka terdapat beberapa isu Strategis yaitu:

1. Pembangunan dapat menimbulkan kerawanan berupa Bencana Sosial;
2. Benacana Alam dapat terjadi sewaktu-waktu di Wilayah Kabupaten Majalengka;
3. Penanganan Bencana Alam belum dilaksanakan secara cepat dikarenakan masih lemah nya koordinasi dengan OPD terkait, kurangnya jumlah dan kopetensi SDM, kurangnya sarana dan prasaranan serta dana Operasional.

1.4 Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi, dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi.

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Lampiran ini berisi Perjanjian Kinerja, Bukti Penyebaran LKIP kepada seluruh pegawai di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka serta SK Tim Penyusunan LKIP.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategi

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Rencana Anggaran Tahun 2023

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Majalengka Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023. Pada Renstra Perubahan terdapat 2 Program.

Perubahan Tujuan BPBD Kabupaten Majalengka

TUJUAN (2018-2023)	TUJUAN (Hasil Reviu : 2019-2023)
Menciptakan Situasi dan Kondisi yang Kondusif di Masyarakat	Membangun Sinergi dan Hubungan yang Harmonis dengan seluruh Mitra Kerja dan Pemangku Kebijakan baik dengan Unsur Legislatif, Pemerintah Desa, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta Pemangku Kepentingan lainnya

Perubahan Sasaran BPBD Kabupaten Majalengka

SASARAN (2018-2023)	SASARAN (Hasil Reviu : 2019-2023)
Terwujudnya Situasi dan Kondisi yang aman, tentram dan tertib di Masyarakat	Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana

Perubahan Indikator Kinerja Sasaran Jangka Menengah BPBD Kabupaten Majalengka Setelah Reviu

INDIKATOR KINERJA (Periode Tahun 2018-2020)	INDIKATOR KINERJA (Hasil Reviu Tahun 2019-2023)
Presentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundangundangan lingkup BPBD	Indeks Ketahanan Daerah Perangkat Daerah
Tingkat pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup BPBD	
Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Lingkup BPBD	

INDIKATOR KINERJA (Periode Tahun 2018-2020)	INDIKATOR KINERJA (Hasil Reviu Tahun 2019-2023)
Presentase sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin pada perangkat daerah lingkup BPBD	
Tingkat kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup BPBD	
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah BPBD	
Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah BPBD	
Meningkatkan Mitigasi dan Penanggulangan Bencana	
Presentase Tanggap Bencana	
Tingkat Penanganan Darurat Bencana	
Tingkat Pemulihan Pascabencana	

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Renstra Tahun 2019-2023 yang mengalami perubahan. Jumlah Indikator Tahun 2023 dengan Tahun 2022 berbeda setelah mengalami perubahan pada Tahun 2023 ada penyederhanaan sasaran kegiatan dan indikator kinerja yaitu hanya mencantumkan Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana sebagai Sasaran Keegiatannya dan Indeks Ketahanan Daerah sebagai Indikator Kinerjanya.

Berikut tabel Indikator Kinerja BPBD selama lima tahun dengan target sebelum dan setelah perubahan:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sebelum Perubahan					Target Setelah Perubahan				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Menciptakan Situasi dan Kondisi yang Kondusif di Masyarakat	Terwujudnya Situasi dan Kondisi yang Aman, Tentram dan Tertib di Masyarakat	Persentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundangan lingkup BPBD	Persen	100	100	100	100	100					
			Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup BPBD	Persen	100	100	100	100	100					
			Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Lingkup BPBD	Persen	100	100	100	100	100					
			Tingkat Sarana dan Prasarana	Persen	100	100	100	100	100					

			yang dilakukan Pemeliharaan Rutin pada Perangkat daerah lingkup BPBD											
			Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan lingkup BPBD	Persen	100	100	100	100	100					
			Tingkat kesesuaian perencanaan daerah dan perencanaan perangkat daerah BPBD	Persen	100	100	100	100	100					
			Tingkat ketersediaan data dan informasi Pembangunan pada perangkat daerah BPBD	Persen	100	100	100	100	100					
			Meningkatkan mitigasi dan	Persen	100	100	100	100	100					

			penanggulangan bencana											
			Presentase tanggap bencana	Persen	100	100	100	100	100					
			Tingkat penanganan darurat bencana	Persen	100	100	100	100	100					
			Tingkat Pemulihan Pasca Bencana											
2	Menurunnya Risiko Bencana	Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah Perangkat Daerah	Poin						0,68	0,68	0,68	0,68	0,71
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen						100	100	100	100	100
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Niali						B	B	B	B	B

			Capaian SAKIP Perangkat Daerah								-	-	B	BB	BB
--	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	----	----

Sebagaimana Renstra Tahun 2018-2023 yang mengalami perubahan, maka Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka juga mengalami perubahan. Perubahan tersebut dilakukan selain untuk menyesuaikan Renstra yang mengalami perubahan, juga untuk meningkatkan kualitas kinerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka.

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan Kepala Pelaksana
Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Manajemen Penanggulangan Bencana	Prosentase Kapasitas Daerah melalui Upaya Pengurangan Risiko Bencana	90-100 %
		Prosentase Penanganan Kejadian dan Pelayanan Korban Bencana	90-100 %
		Prosentase Pemulihan dengan Rehabilitasi dan Rekontruksi Saranan Prasarana Pasca Bencana	90-100 %
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Realisasi Anggaran dan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja	90-100 %
		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	90-100 %
		Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur	90-100 %
3.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	58 Nilai
		Nilai SAKIP PERangkat Daerah	BB Nilai
		Nilai IKM Perangkat Daerah	B Nilai

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Setelah Perubahan Kepala Pelaksana
Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,71 Poin

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, ditetapkan Rencana Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 yang terdiri dari:

PROGRAM	Rencana Anggaran (Rp)	Persentase (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,350,422,302	63,70
Program Penanggulangan Bencana	1,908,964,000	36,30
JUMLAH	5.259.386.302	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Kinerja Tahun 2023

Analisis Capaian Kinerja

Akuntabilitas Keuangan

Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 adalah sebesar 98,59 %. Sebanyak 1 (satu) indikator tidak mencapai 100%.

Capaian IKU

98.59

Indeks Ketahanan Daerah

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,71	0,70	98,59 %



MENINGKATNYA KETAHANAN DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA



FAKTOR

- ❑ Ada 10 Indikator yang belum terisi agar nilai Indeks Ketahanan Daerah dapat meningkat
- ❑ Mempertahankan indikator yang sudah terisi
- ❑ Menyusun kembali dokumen perencanaan penanggulangan bencana yang sudah melewati masa kadaluarsa

- ❑ Program Penanggulangan Bencana

PROGRAM

EFISIENSI

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah pada sasaran Meningkatkan Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana tidak ada karena IKU hanya mencapai 98,59 %

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

INDIKATOR 1 INDEKS KETAHANAN DAERAH

A. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2023

Tabel 3.2
Target dengan Realisasi Tahun 2023

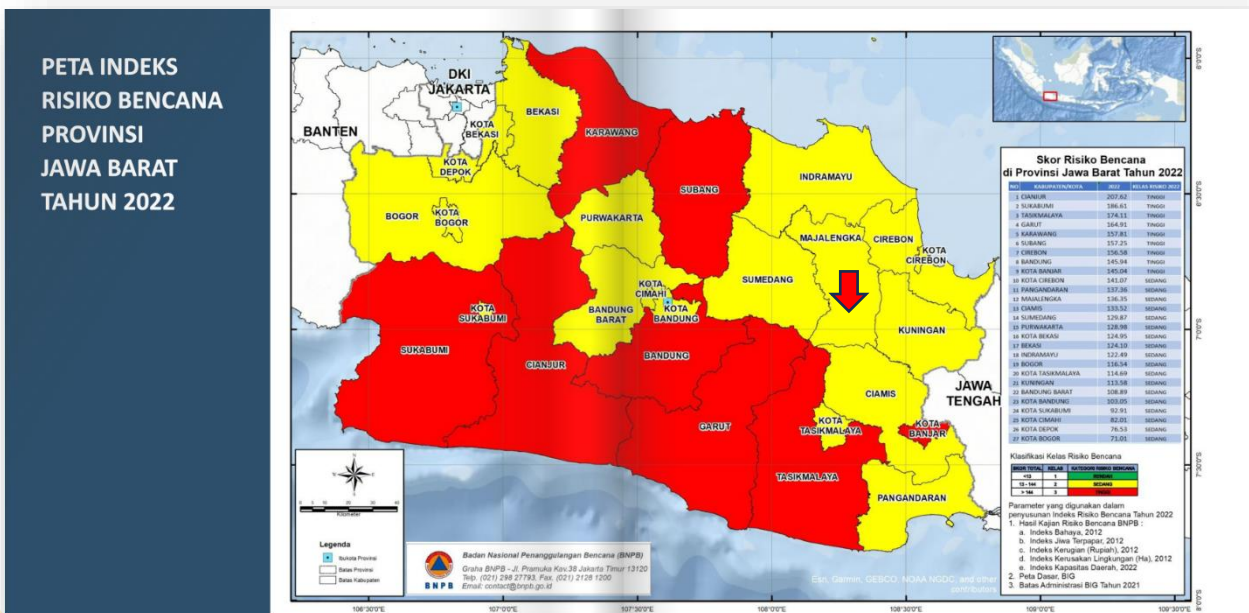
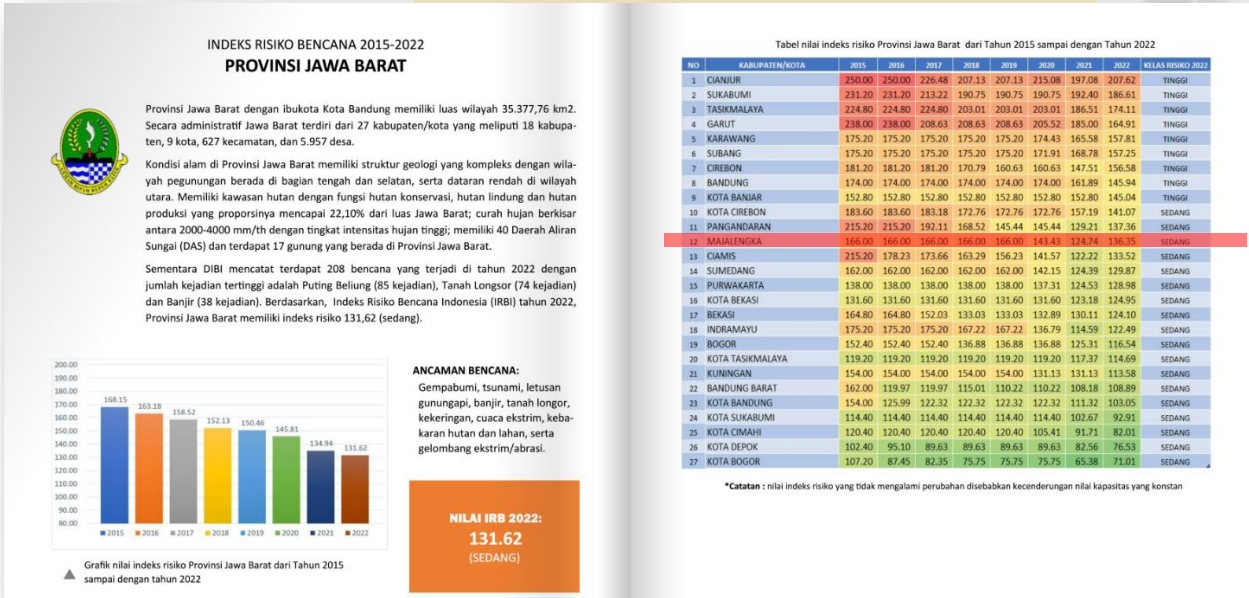
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,71	0,70	98,59 %

Indeks Ketahanan Daerah sendiri adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Tiga hal tersebut, yaitu indeks kapasitas, kerentanan, dan ancaman bencana adalah komponen penyusun IRBI (Indeks Risiko Bencana Indonesia). Oleh karenanya, dengan Indeks Ketahanan Daerah yang mengukur kapasitas suatu daerah dapat dilakukan monitoring dan evaluasi naik dan turunnya IRBI (Indeks Risiko Bencana Indonesia) di daerah tertentu. Dari IKD (Indeks Risiko Bencana Indonesia), maka setiap kab/kota mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko.

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	SKOR	KELAS RISIKO
231	DHARMASRAYA	SUMATERA BARAT	137.69	SEDANG
232	PIDIE JAYA	ACEH	137.60	SEDANG
233	TOJO UNA-UNA	SULAWESI TENGAH	137.60	SEDANG
234	PANGANDARAN	JAWA BARAT	137.36	SEDANG
235	MINAHASA SELATAN	SULAWESI UTARA	137.22	SEDANG
236	SOLOK	SUMATERA BARAT	137.20	SEDANG
237	SOLOK SELATAN	SUMATERA BARAT	137.20	SEDANG
238	BOLAANG MONGGONDOW	SULAWESI UTARA	136.96	SEDANG
239	TULUNGAGUNG	JAWA TIMUR	136.66	SEDANG
240	MAJALENGA	JAWA BARAT	136.35	SEDANG
241	SERUYAN	KALIMANTAN TENGAH	136.28	SEDANG
242	ENREKANG	SULAWESI SELATAN	136.13	SEDANG
243	LOMBOK TENGAH	NUSA TENGGARA BARAT	136.01	SEDANG
244	KAPUAS	KALIMANTAN TENGAH	135.95	SEDANG
245	PAMEKASAN	JAWA TIMUR	135.94	SEDANG
246	KAPUAS HULLU	KALIMANTAN BARAT	135.91	SEDANG
247	KOTA MOJOKERTO	JAWA TIMUR	135.88	SEDANG
248	POLEWALI MANDAR	SULAWESI BARAT	135.81	SEDANG
249	WAKATOBİ	SULAWESI TENGGARA	135.60	SEDANG
250	LEMBATA	NUSA TENGGARA TIMUR	135.27	SEDANG
251	BOLAANG MONGGONDOW TIMUR	SULAWESI UTARA	135.19	SEDANG
252	BONE BOLANGO	GORONTALO	135.07	SEDANG
253	SAROLANGUN	JAMBI	134.20	SEDANG
254	ACEH TAMIANG	ACEH	133.66	SEDANG
255	CIAMIS	JAWA BARAT	133.52	SEDANG
256	SINTANG	KALIMANTAN BARAT	133.20	SEDANG
257	BOVEN DIGOEL	PAPUA	133.20	SEDANG
258	BIMA	NUSA TENGGARA BARAT	132.93	SEDANG
259	KOLAKA	SULAWESI TENGGARA	132.84	SEDANG
260	YAHUKIMO	PAPUA	132.80	SEDANG
261	KOTA LHOEKSEUMAWÉ	ACEH	132.70	SEDANG
262	TULANG BAWANG	LAMPUNG	132.70	SEDANG
263	KOTA PRABUMULIH	SUMATERA SELATAN	132.40	SEDANG
264	BINTAN	KEPULAUAN RIAU	132.40	SEDANG

Indeks Ketahanan Daerah berkaitan dengan penilaian IRBI (Indeks Risiko Bencana Indonesia) yang merupakan sasaran strategis dari Bupati Kabupaten Majalengka maka dengan peningkatan nilai IKD sangat berpengaruh terhadap hasil yang baik pada penilaian IRBI sehingga Kabupaten Majalengka bisa mendapatkan ranking yang baik dari 26 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat bahkan pada ranking seluruh

Kabupaten/Kota di Indonesia. Perlu diketahui bahwa rangking Kabupaten Majalengka pada Tahun 2022 menempati rangking ke 240 dari 513 Kabupaten/Kota tingkat nasional dan rangking ke 12 dari 26 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dengan skor 136,35 maka kelas risikonya Sedang.



sumber: Buku IRBI Tahun 2022

Indeks Ketahan Daerah Kabupaten Majalengka dinilai dari 71 butir indikator dari 7 Fokus Prioritas sehingga pada tahun 2023 yaitu 0,70 dari target kinerja 0,71 sehingga capaian kinerja nya hanya 98,59 % dari seharusnya 100,00 %, akan tetapi dari 3 tahun terakhir Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Majalengka selalu ada peningkatan nilai seperti tahun 2021 dengan nilai 0,58, lalu tahun 2022 dengan nilai 0,64 maka peningkatan nilai dari tahun sebelumnya adalah 0,06 dan tahun

INDEKS KETAHANAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA BARAT								
NO	KABUPATEN/KOTA	2020	2021	2022		2023		KETERANGAN 2022 - 2023
				SELF ASSESSMENT	BNPB	SELF ASSESSMENT	BNPB	
1	Bandung	-	0,5	0,66	0,52	0,7	0,56	NAIK
2	Bandung Barat	-	0,38	0,48	0,47	0,45	0,44	TURUN
3	Bekasi	0,34	0,52	0,51	0,48	0,55	0,53	NAIK
4	Bogor	-	0,42	0,65	0,51	0,58	-	-
5	Ciamis	0,39	0,56	0,83	0,64	0,71	0,68	NAIK
6	Cianjur	-	0,49	0,75	0,5	0,78	0,61	NAIK
7	Cirebon	0,62	0,7	0,48	0,5	0,5	0,5	SAMA
8	Garut	0,5	0,64	0,74	0,65	0,83	0,72	NAIK
9	Indramayu	-	0,5	0,58	0,64	0,68	0,65	NAIK
10	Karawang	0,59	0,66	0,45	0,4	0,38	0,36	TURUN
11	Kota Bandung	0,55	0,63	0,61	0,59	0,61	0,6	NAIK
12	Kota Banjar	0,86	0,9	0,41	0,39	0,54	0,39	SAMA
13	Kota Bekasi	0,32	0,35	0,38	0,33	-	-	-
14	Kota Bogor	0,3	0,47	0,75	0,74	0,74	-	-
15	Kota Cimahi	0,33	0,39	0,8	0,65	0,78	0,77	NAIK
16	Kota Cirebon	0,4	0,43	0,64	0,57	0,72	0,62	NAIK
17	Kota Depok	-	0,52	0,68	0,53	0,6	0,45	TURUN
18	Kota Sukabumi	-	0,76	0,59	0,53	0,61	0,57	NAIK
19	Kota Tasikmalaya	-	0,84	0,4	0,35	0,45	0,43	NAIK
20	Kuningan	-	0,49	0,72	0,68	0,68	0,64	TURUN
21	Majalengka	-	0,58	0,64	0,62	0,7	0,63	NAIK
22	Pangandaran	-	0,49	0,68	0,68	0,69	0,68	SAMA
23	Purwakarta	-	0,41	0,41	0,41	0,49	0,48	NAIK
24	Subang	-	0,5	0,41	0,43	0,6	0,51	NAIK
25	Sukabumi	0,6	0,65	0,48	0,43	0,5	0,47	NAIK
26	Sumedang	-	0,34	0,49	0,49	0,52	0,46	TURUN
27	Tasikmalaya	-	0,25	0,63	0,5	0,73	0,58	NAIK
	JAWA BARAT	-	0,65	0,72	0,69	0,75	0,71	NAIK
								16
								5
								3

2023 dengan nilai 0,70 maka peningkatan nilai dari tahun sebelumnya adalah 0,06 sehingga hal ini merupakan hal baik bagi Kabupaten Majalengka walaupun realisasi kinerja belum sesuai target.

B. Perbandingan Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Peningkatan/ Penurunan
1	Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,70	0,64	0,06

Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2022 targetnya yaitu 0,68 poin sedangkan realisasinya 0,64 poin atau capaian 94,12 % dengan selisih 0,04 atau 5,41 % sehingga realisasinya tidak tercapai.

Hal tersebut merupakan hal yang baik walaupun 2 tahun berturut-turut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka mengalami gagal ketercapaian target kinerja. Jika melihat evaluasi dari realisasi tahun sebelumnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka telah melaksanakan peningkatan kinerja dengan dibuktikan peningkatan nilai Indeks Ketahanan Daerah.

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Capaian 2022	Peningkatan/ Penurunan
1	Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	98,59 %	94,12 %	4,47 %

Nilai Indeks Ketahanan Daerah dari tahun 2022 mengalami kenaikan 4,47 % di tahun 2023 walaupun pada tahun 2023 poin Indeks Ketahanan Daerah belum mencapai target kembali selisih 0,01 atau 1,41 % jika dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami perbaikan selisih dengan target kinerja selain itu juga mengalami peningkatan nilai dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,06 atau 4,47 %.

Hal ini juga berlaku untuk capaian kinerja tahun 2022 hingga 2023 karena 2 tahun berturut-turut capaian kinerja mengalami peningkatan sebesar 4,47 % walaupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka mengalami gagal ketercapaian target kinerja. Jika melihat evaluasi dari realisasi tahun sebelumnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka telah melaksanakan peningkatan kinerja dengan dibuktikan peningkatan nilai Indeks Ketahanan Daerah.

C. Perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
1	Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,70	-	-

Pada indikator Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2023 tidak dapat membandingkan realisasi dengan target akhir renstra dikarenakan pada target akhir renstra tidak mencantumkan indikator kinerja tersebut dan karena ada perubahan indikator pada tahun 2023.

D. Perbandingan Kinerja Tahun 2023 dengan rata-rata/standar Provinsi/Nasional

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan rata-rata/standar Provinsi/Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Rata-Rata Provinsi/Nasional	Hasil Perbandingan
1	Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,70	0,60	0,10

NO	KABUPATEN/KOTA	2020	2021	2022		2023		KETERANGAN 2022 - 2023
				SELF ASSESSMENT	BNPB	SELF ASSESSMENT	BNPB	
1	Bandung	-	0,5	0,56	0,52	0,7	0,56	NAIK
2	Bandung Barat	-	0,38	0,48	0,47	0,45	0,44	TURUN
3	Bekasi	0,34	0,52	0,51	0,48	0,55	0,53	NAIK
4	Bogor	-	0,42	0,65	0,51	0,58	-	-
5	Ciamis	0,39	0,56	0,83	0,64	0,71	0,68	NAIK
6	Cianjur	-	0,49	0,75	0,5	0,78	0,61	NAIK
7	Cirebon	0,62	0,7	0,48	0,5	0,5	0,5	SAMA
8	Garut	0,8	0,64	0,74	0,65	0,83	0,72	NAIK
9	Indramayu	-	0,5	0,58	0,64	0,68	0,65	NAIK
10	Karawang	0,59	0,66	0,45	0,4	0,38	0,36	TURUN
11	Kota Bandung	0,55	0,63	0,61	0,59	0,61	0,6	NAIK
12	Kota Banjar	0,86	0,9	0,41	0,39	0,54	0,39	SAMA
13	Kota Bekasi	0,32	0,35	0,38	0,33	-	-	-
14	Kota Bogor	0,3	0,47	0,75	0,74	0,74	-	-
15	Kota Cimahi	0,33	0,39	0,8	0,65	0,78	0,77	NAIK
16	Kota Cirebon	0,4	0,43	0,64	0,57	0,72	0,62	NAIK
17	Kota Depok	-	0,52	0,68	0,53	0,6	0,45	TURUN
18	Kota Sukabumi	-	0,76	0,59	0,51	0,61	0,57	NAIK
19	Kota Tasikmalaya	-	0,84	0,4	0,35	0,45	0,43	NAIK
20	Kuningan	-	0,49	0,72	0,68	0,68	0,64	TURUN
21	Majalengka	-	0,58	0,64	0,62	0,7	0,63	NAIK
22	Pangandaran	-	0,49	0,68	0,68	0,69	0,68	SAMA
23	Purwakarta	-	0,41	0,41	0,41	0,49	0,48	NAIK
24	Subang	-	0,5	0,41	0,43	0,6	0,51	NAIK
25	Sukabumi	0,6	0,65	0,48	0,43	0,5	0,47	NAIK
26	Sumedang	-	0,34	0,49	0,49	0,52	0,46	TURUN
27	Tasikmalaya	-	0,25	0,63	0,5	0,73	0,58	NAIK
	JAWA BARAT	-	0,65	0,72	0,69	0,75	0,71	NAIK
								NAIK 16
								TURUN 5
								SAMA 3

Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat, nilai Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 0,70 sedangkan rata-rata nilai Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Jawa Barat adalah 0,60 sehingga nilai Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Majalengka lebih baik 0,10 dari rata-rata Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Hal tersebut merupakan hal baik karena nilai Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Majalengka sudah jauh diatas rata-rata sehingga walaupun dalam kurun 2 tahun terakhir Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak mencapai target dari nilai Indeks Ketahanan Daerah, banyak nilai baik dari capaian tahun ini yaitu peningkatan realisasi sebesar 0,06 atau 4,47 % lalu nilai yang jauh diatas rata-rata Provisini Jawa Barat yaitu dengan selisih 0,10 ini merupakan hasil kinerja yang perlu diapresiasi dengan beberapa catatan perbaikan untuk tahun setelahnya.

E. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Keberhasilan/Kegagalan dan Upaya yang Telah dilakukan dan Upaya yang akan dilakukan di Tahun Selanjutnya



Faktor yang menyebabkan kegagalan capaian indikator adalah dari 7 prioritas semuanya terisi sedangkan dari 71 Indikator penilaian Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Majalengka hanya ada 10 indikator yang terdiri dari Rencana Kontijensi Gempa Bumi, Rencana Kontijensi Banjir, Rencana Kontijensi Tanah Longsor, Rencana Kontijensi Kebakaran Hutan dan Lahan, Infrastruktur Evakuasi Bencana Erupsi Gunung Api, Rencana Kontijensi Kekeringan dan Rencana Kontijensi Banjir Bandang. Dari 10 indikator tersebut mayoritas harus tersusunnya Dokumen Rencana Kontijensi setiap jenis bencana

yang dimana Kabupaten Majalengka baru mempunyai Dokumen Rencana Kontijensi Erupsi Gunung Api.

Dalam proses penyusunan dokumen Rencana Kontijensi per-jenis bencana memerlukan ketersediaan anggaran yang cukup banyak dan memerlukan waktu yang tidak sebentar selain memakan waktu dalam proses penyusunannya terkadang proses dalam pengesahan pun membutuhkan waktu apalagi dokumen tersebut tidak dapat disusun multi bahaya tetapi harus disusun per jenis ancaman. Jika dokumen-dokumen itu dapat disusun oleh Kabupaten Majalengka maka nilai IKD pun akan meningkat maka Indeks Risiko Bencana pun nilai nya akan baik bahkan rangkingnya pun menjadi lebih baik.



Upaya yang telah dilakukan sehingga dilihat dari perbandingan nilai Indeks Ketahanan Daerah tahun 2023 dengan tahun sebelumnya, salah satunya adalah tersusunnya dokumen Kajian Risiko Bencana pada tahun anggaran 2022. Dengan disusunnya dokumen tersebut merupakan langkah yang besar karena dokumen tersebut merupakan perencanaan, pemetaan ancaman segala jenis ancaman yang jarang dipunyai oleh setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Namun dokumen tersebut mempunyai masa kadaluarsa yaitu 5 tahun setelah dokumen tersebut di sah

kan maka jika ingin masih terhitung mempunyai dokumen kajian risiko bencana maka Kabupaten Majalengka harus menganggarkan untuk penyusunan dokumen kajian risiko bencana pada tahun 2027.

Lalu Badan Penanggulangan Bencana telah melaksanakan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota ke beberapa sektor di Kabupaten Majalengka seperti ke Sektor Pendidikan, Komunitas, Pemerintah Desa dengan jumlah peserta yang mencapai lebih dari target kinerja kegiatan tersebut. Walaupun kegiatan tersebut bukan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka yang mengadakan kegiatan Sosialisasinya akan tetapi kami hanya sebagai fasilitator atau narasumber dari pihak luar untuk memeberikan materi sosialisasi perihal daerah rawan bencana.



Konteks dari sosialisasi antara lain adalah memberikan pemahaman jenis ancaman yang berada di daerah tersebut karena beda morfologi berbeda pula jenis ancamannya seperti jika berada di daerah perbukitan curam (Gunung Ciremai, sebagian kecil Kecamatan Rajagaluh, Argapura, Sindang, Talaga, Banjaran, Bantarujeg, Malausma, Lemahsugih, dan Cikijing bagian Utara) maka

ancamannya yaitu Longsor, Erupsi Gunung Api, Gempa Bumi, Cuaca Ekstrim, Kebakaran Hutan dll. Sedangkan yang berada pada morfologi pedataran (Kadipaten, Panyingkiran, Dawuan, Jatiwangi, Sumberjaya, Ligung, Jatitujuh, Kertajati, Cigasong, Majalengka, Leuwimunding dan Palasah) maka ancamannya banjir, kekeringan dll. Selain itu juga menjelaskan perihal paradigma pencegahan sehingga ditekan untuk memitigasi bencana sehingga dapat meminimalisir korban dan kerugian akibat bencana.

Upaya yang telah dilakukan antara lain pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana, telah melaksanakan kegiatan Hari Kesiapsiagaan Bencana tahun 2023 dan pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) pada saat Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) pada 26 April 2023 yang



mengundang unsur Pentahelix yang bertujuan agar mendorong Kerjasama efektif antar pihak dan pemangku kepentingan dalam kegiatan pengurangan risiko bencana selain itu menyusun pengurangan risiko bencana secara perencanaan, kebijakan dan program Pembangunan di Kabupaten Majalengka.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka telah melaksanakan penanganan bencana selama tahun 2023 dengan dibantu oleh 51 orang PUSDALOPS-PB yaitu ada 426 kejadian dengan rincian 22 kejadian Banjir, 13

kejadian Erosi, 87 kejadian Longsor, 13 kejadian Gerakan Tanah, 48 kejadian Cuaca Ekstrim, 28 kejadian Kekeringan, 193 kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan, 2 kejadian Gempa Bumi, 20 kejadian Bencana/Musibah Lainnya, dengan jumlah korban dari dampak bencana 44.975 jiwa dengan rincian 11 jiwa meninggal dunia, 44.859 jiwa menderita, 92 jiwa mengungsi, 12 jiwa luka-luka dan 1 jiwa hilang. Dampak korban jiwa berdampak pula ke bangunan seperti hunian Masyarakat yaitu sebanyak 317 unit rumah mengalami kerusakan dengan rincian 230 unit rusak ringan, 38 unit rusak sedang, 49 unit rusak berat selain itu sebanyak 1.622 unit rumah terendam dan 179 jiwa terancam.



Dampak dari bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Majalengka Tahun 2023 yaitu seluas 407,84 Ha terdampak, dampak dari bencana kekeringan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka dibantu oleh stakeholder seperti PDAM Kabupaten Majalengka, PMI Kabupaten Majalengka dan POLRES Majalengka telah mendistribusikan air bersih

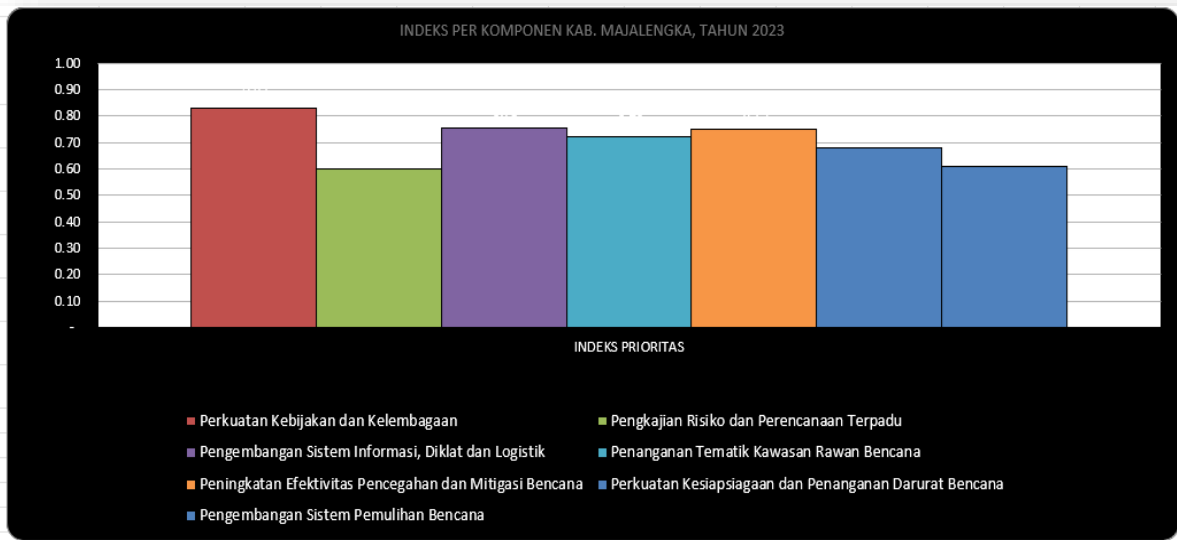
kepada Masyarakat sebesar 1.066.000 liter. Tindaklanjut dari terjadinya bencana adalah mendistribusikan bantuan logistik kepada Masyarakat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka telah memberikan bantuan logistik kepada 107 jiwa selama Tahun 2023.



Pada masa pasca bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka melaksanakan distribusi bantuan berupa Bronjong Kawat kepada korban akibat bencana sebagai bentuk kongkrit dalam penanganan pasca bencana, hal ini bersifat stimulan yang bertujuan agar penanganan akibat bencana

segera diperbaiki sehingga tidak menimbulkan kerusakan/kerugian bagi Masyarakat yang terdampak bencana.

Upaya yang akan dilakukan kedepannya oleh Kabupaten Majalengka adalah memberikan pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dan yang harus dilakukan untuk meningkatkan nilai Indeks Ketahanan Daerah adalah menyusun ulang dokumen rencana kontijensi erupsi gunung api karena sudah kaladua pada tahun 2023 jika ingin masih dihitung dalam penilaian IKD tahun selanjutnya dan menyusun dengan mengalokasikan anggaran untuk penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana lalu dokumen Rencana Kontijensi ancaman yang berpotensi terjadi di Kabupaten Majalengka



seperti Banjir, Tanah Longsor, Banjir Bandang, Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan. Selain itu berdasarkan Indeks Prioritas dari IRBI perlu adanya perkuatan kebijakan dan kelembagaan, pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik, peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana, adanya pengembangan sistem pemulihan bencana, penyusunan perencanaan terpadu, penanganan tematik

Kawasan rawan bencana, penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana.

F. Program yang Mendukung Keberhasilan/Kegagalan

Tabel 3.7

Program yang Mendukung Keberhasilan/Kegagalan

No	Program	Pengampu	Anggaran
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN		5.259.386.302
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekertaris Badan	3.350.422.302
2.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Kepala Rehabilitasi dan Rekontruksi	1.908.964.000

G. Efisiensi Anggaran jika IKU tidak mencapai 100 %

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah pada sasaran Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana tidak ada karena IKU hanya mencapai 98,59 %.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Serapan anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Serapan Anggaran (%)
1.	Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	99,91 %	1.907.304.000



BAB 4

KESIMPULAN

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 menyajikan capaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya, perbandingan dengan RENSTRA, perbandingan dengan Kabupaten Majalengka, kendala yang dihadapi, Upaya yang telah dilaksanakan dan Upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian di tahun selanjutnya.

Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 belum mencapai target yaitu hanya 98,59 % yaitu dengan realisasi hanya 0,70 sedangkan target adalah 0,71, akan tetapi realisasi IKD Tahun 2023 lebih baik atau naik nilainya dibandingkan dengan realisasi IKD Tahun sebelumnya meskipun tahun 2023 belum mencapai target yang diinginkan yaitu selisih 0,1 poin.

Dalam upaya peningkatan pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka akan berupaya memperbaiki capaian kinerja pada indikator Indeks Ketahanan Daerah dengan melaksanakan lebih baik dari tahun sebelumnya pada 71 indikator pada penilaian Indeks Ketahanan Daerah sehingga nilai Indeks Ketahanan Daerah minimal sesuai target indikator maksimal dapat melebihi target indikator pada tahun selanjutnya sehingga berbanding lurus dengan nilai Indeks Risiko Bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 berhasil menggunakan sumber daya yang berkaitan langsung dengan pencapaian Indeks Ketahanan Daerah sesuai dengan peruntukannya sebesar 94,79 % atau Rp. 4.570.727.238,00 dari total anggaran sebesar Rp. 5,265,991,484,00, karena hanya anggaran kegiatan perencanaan, kegiatan administrasi keuangan dan kegiatan bidang yang diambil karena mendukung langsung pada keberhasilan/kegagalan indikator.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan memaksimalkan koordinasi dengan seluruh pegawai di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan yang akuntabel, berorientasi pada hasil dan berdampak bagi masyarakat.



LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. ISKANDAR HADI PRIYANTO, S.Sos., M.Si.**
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Majalengka
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.**
Jabatan : Bupati Majalengka
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.



H. ISKANDAR HADI PRIYANTO, S.Sos., M.Si.
NIP. 19640330 198503 1 007

Majalengka, Januari 2023

Pihak Pertama,

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Manajemen Penanggulangan Bencana	Presentase Kapasitas Daerah melalui Upaya Pengurangan Risiko Bencana	90 - 100 %
		Presentase Penanganan Kejadian Korban Bencana	90 - 100 %
		Presentase Pemulihan dengan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana	90 - 100 %
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Realisasi Anggaran dan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja	90 - 100 %
		Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	90 - 100 %
		Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur	90 - 100 %
3.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kelantraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	58 Nilai
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai
		Nilai IKM Perangkat Daerah	B Nilai

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penanggulangan Bencana	Rp 1.419.564.000,00	APBD
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp 4.398.797.298,00	APBD
	JUMLAH	Rp 5.818.361.298,00	



Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

Majalengka, Januari 2023

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Majalengka,



H. ISKANDAR HADI PRIYANTO, S.Sos., M.Si.
NIP. 19640330 198503 1 007

Lampiran I
Perjanjian Kinerja Setelah Perubahan



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **H. ISKANDAR HADI PRIYANTO, S.Sos., M.Si.**
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Majalengka pada Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Majalengka
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.**
Jabatan : Bupati Majalengka
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

Majalengka, November 2023



H. ISKANDAR HADI PRIYANTO, S.Sos., M.Si.
NIP. 19640330 198503 1 007

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,71 Poin

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penanggulangan Bencana	Rp 1.908.964.000	APBD
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.350.422.302	APBD
JUMLAH	Rp 5.259.386.302	



Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

Majalengka, November 2023

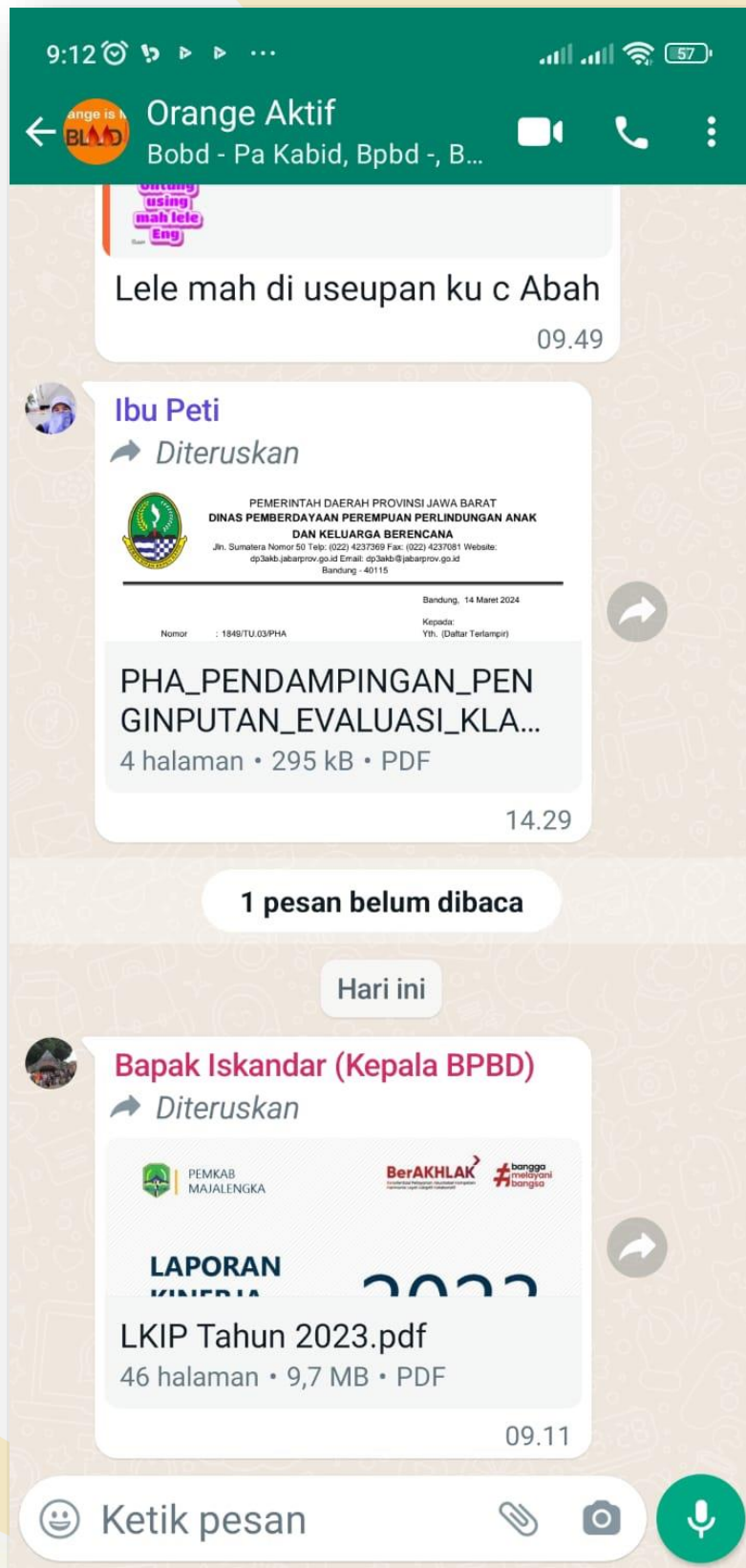
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Majalengka,



H. ISKANDAR HADI PRIYANTO, S.Sos., M.Si.
NIP. 19640330 198503 1 007

Lampiran III

Bukti Penyebaran LKIP kepada seluruh pegawai melalui grup *Whatsapp* Badan Penanggulangan Bencana Daerah





PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Gerakan Koperasi No. 43 Telp/Fax (0233) 283044 Majalengka 45411
e-mail: bpbdkabmajalengka@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR: PR.00-05/001/BPBD

TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2023

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa untuk mendapatkan Dokumen LAKIP OPD yang baik perlu dibentuk Tim Penyusunan yang kredibel, mampu dan kompeten;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka dipandang perlu penetapan Tim Penyusun LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Majalengka Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4714);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

18. Peraturan Presiden...

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Tahun 2015;
20. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/MPAN/9/2004 Tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 422);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembar Daerah Nomor 45);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembar Daerah Nomor 64);
27. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKDP) Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 35 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka No. 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2019 (Lembar Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Kesatu : Penetapan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 adalah:
- a. Mengumpulkan data bahan LKIP Tahun 2023;
 - b. Mengolah dan menganalisis data bahan LKIP Tahun 2023;
 - c. Menyusun LKIP Tahun 2023.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka

Pada Tanggal : 25 Januari 2023



H. ISKANDAR HADI PRIYANTO, Sos., M.Si.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BPBD KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA TAHUN 2023

**TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2023**

Penanggungjawab : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Majalengka
Ketua : Sekertaris BPBD Kabupaten Majalengka
Sekertaris : Perencana Ahli Muda Sekretariat BPBD Majalengka
Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPBD
Majalengka
2. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Sekretariat
BPBD Majalengka

KEPALA PELAKSANA,


H. HANANDI HADI PRIYANTO, Sos., M.Si.